



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa serta kegiatan-kegiatan yang mendesak yang harus segera dilaksanakan pada Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II.1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.1 Peraturan ini.
3. Ketentuan Lampiran II.2 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran II.3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.3 Peraturan ini.
5. Ketentuan Lampiran II.4 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.4 Peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran II.5 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.5 Peraturan ini.
7. Ketentuan Lampiran II.6 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.6 Peraturan ini.

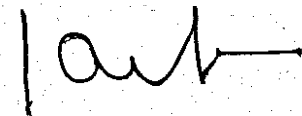
8. Ketentuan Lampiran II.7 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.7 Peraturan ini.
9. Ketentuan Lampiran II.8 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.8 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

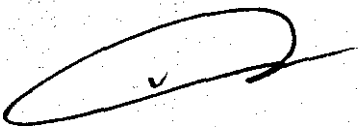
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

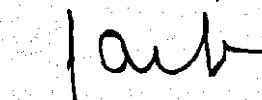


SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 46

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp) / (-)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	894.603.104.000,00	899.591.344.000,00	4.988.240.000,00	0,56
2.2.1	Belanja Pegawai	7.082.193.000,00	7.082.193.000,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	544.714.069.000,00	547.217.309.000,00	2.503.240.000,00	0,46
2.2.3	Belanja Modal	342.806.842.000,00	345.291.842.000,00	2.485.000.000,00	0,72
	SURPLUS / (DEFISIT)	(189.745.701.000,00)	(194.733.941.000,00)	(4.988.240.000,00)	2,63
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	199.745.701.000,00	204.733.941.000,00	4.988.240.000,00	2,50
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109.745.701.000,00	114.733.941.000,00	4.988.240.000,00	4,55
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	189.745.701.000,00	194.733.941.000,00	4.988.240.000,00	2,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	5.639.000.000,00	5.639.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2.506.250.000,00	2.506.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.150.633.000,00	5.150.633.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.275.800.000,00	1.275.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	16.524.487.000,00	16.524.487.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	19.104.999.000,00	19.104.999.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	256.800.000,00	256.800.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(128.836.313.000,00)	(131.336.313.000,00)	(2.500.000.000,00)	1,94	

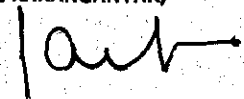
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.02.01 Dinas Kesehatan

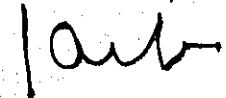
Printed by Sio08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.850.000,00	380.550.000,00	199.700.000,00	110,42	
1.05 . 1.05.02 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.350.000,00	368.250.000,00	192.900.000,00	110,01	
1.05 . 1.05.02 . 15.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	12.300.000,00	6.800.000,00	123,64	
1.05 . 1.05.02 . 15.36	Penanganan Konflik Sosial	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.40	Peningkatan Kewaspadaan Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.134.757.000,00)	(5.334.757.000,00)	(200.000.000,00)	3,90	
BUPATI KARANGANYAR,  JULIYATMONO						
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

1

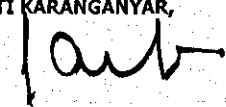
KODE REKENCING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	250.410.000,00	250.410.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	250.410.000,00	250.410.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	54.177.500,00	54.177.500,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	54.177.500,00	54.177.500,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	814.800.000,00	841.380.000,00	26.580.000,00	3,26	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya	814.800.000,00	841.380.000,00	26.580.000,00	3,26	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.29	Belanja Jasa Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.29.03	Belanja Jasa Sosialisasi Kepada Masyarakat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.13	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan	942.717.500,00	942.717.500,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.15	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.19	Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah	311.425.000,00	311.425.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.27	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.29	Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan	373.513.000,00	373.513.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.30	Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.31	Controlled Landfill TPA Sukosari Jumantono	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.15.33	Rehabilitasi Sarana Prasarana Persampahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	832.900.000,00	832.900.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	172.329.000,00	172.329.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	274.650.000,00	274.650.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.331.078.000,00)	(15.831.818.000,00)	(500.740.000,00)	3,27	

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.12	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.15	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.46	Operasional Pendampingan Dana Desa Tingkat Kabupaten	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.903.507.000,00)	(7.253.507.000,00)	(350.000.000,00)	5,07	

BUPATI KARANGANYAR,



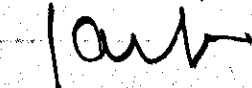
JULIYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Printed By Simo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.24	<i>Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.25	<i>Bimbingan Teknis Kerjasama</i>	34.725.000,00	34.725.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.935.000.000,00	3.935.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.03 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.03 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1.550.010.000,00	1.550.010.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	645.500.000,00	645.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.03 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	859.500.000,00	859.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	911.900.000,00	911.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	124.650.000,00	124.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	221.100.000,00	221.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	170.850.000,00	170.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	325.400.000,00	325.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.746.708.000,00)	(49.914.208.000,00)	(1.167.500.000,00)	2,40	

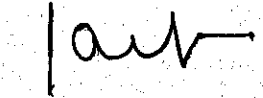
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.700.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.450.000,00	4.900.000,00	2.450.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.500.000,00	159.500.000,00	58.000.000,00	57,14	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101.500.000,00	159.500.000,00	58.000.000,00	57,14	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	22.250.000,00	6.800.000,00	44,01	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	15.560.000,00	6.800.000,00	77,63	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.10	BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.12	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.17	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.18	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.23	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.24	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	280.400.000,00	280.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.03.01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.495.847.000,00)	(17.565.847.000,00)	(70.000.000,00)	0,40	

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.05.00.00.4	PENDAPATAN	1.819.919.330.000,00	1.819.919.330.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 22.000.000.000,00 = 22.000.000.000,00 1 tahun x 92.733.941.000,00 = 92.733.941.000,00
4.04.4.04.05.00.00.5	BELANJA	411.556.687.000,00	411.556.687.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.408.362.643.000,00	1.408.362.643.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04.4.04.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	199.745.701.000,00	204.733.941.000,00	4.988.240.000,00	2,50	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109.745.701.000,00	114.733.941.000,00	4.988.240.000,00	4,55	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	87.745.701.000,00	92.733.941.000,00	4.988.240.000,00	5,68	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	87.745.701.000,00	92.733.941.000,00	4.988.240.000,00	5,68	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	189.745.701.000,00	194.733.941.000,00	4.988.240.000,00	2,63	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.50	Sosialisasi Pajak Daerah	84.588.000,00	84.588.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.55	Administrasi Keberatan Pajak Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.56	Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.58	Pendataan dan Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.62	Cetak Massal SPPT PBB P2	298.415.000,00	298.415.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.71	Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	199.600.000,00	199.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.73	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.75	Pengelolaan Gedung Wanita	119.980.000,00	119.980.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.79	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Barang Milik Daerah	111.024.000,00	111.024.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.83	Fasilitasi Pengurusan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.84	Penataan Penggajian PNS Kabupaten Karanganyar	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.87	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	155.056.000,00	155.056.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.88	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	40.585.000,00	40.585.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.90	Penelitian dan Pemeriksaan Tingkat Lanjut Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.91	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pajak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.92	Penyusunan Peraturan Tentang Barang Milik Daerah	57.964.500,00	57.964.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.101	Penyusunan dan Cetak Peraturan Daerah Tentang TGR Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	822.983.000,00	822.983.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.04.05 . 20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	99.907.500,00	99.907.500,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.04.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	183.841.000,00	183.841.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.091.895.000,00	99.891.895.000,00	(200.000.000,00)	(0,20)	

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO